

## Seluruh Unsur Partai Golkar Sepakat Usung Harda Kiswaya

**SLEMAN (KR)** - Seluruh unsur Partai Golkar Sleman mulai dari pengurus DPD Golkar, anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Pimpinan Kecamatan (PK) se Sleman (17 PK) sepakat Harda Kiswaya diusung sebagai Calon Bupati Sleman pada Pilkada 2024. Sedang untuk pasangannya (Calon Wakil Bupati Sleman) masih dinamis.

Ketua DPD Partai Golkar DIY Drs HM Gandung Pardiman MM menyambut baik adanya kesepakatan ini. "Kami (DPD Partai Golkar DIY) hanya mengikuti alur aspirasi dari bawah saja. Semoga tidak ada perubahan signifikan, sehingga kita bisa fokus untuk memenangkan Pilkada di Sleman ini," katanya usai konsolidasi

internal partai di Kantor Partai Golkar Kabupaten Sleman, Sabtu (6/7).

Ketua DPD Partai Golkar Sleman Janu Ismadi mengatakan, saat ini sedang membangun koalisi dengan partai-partai lain yang juga mengusung Harda Kiswaya. Termasuk berkomunikasi untuk mencari cawabup yang pas dan punya *chemistry* dengan



KR-Devid Permana

**Gandung Pardiman memberikan arahan.**

Harda Kiswaya. "Untuk cabup sudah sepakat Harda Kiswaya, sedangkan untuk cawabup masih dinamis," katanya.

Sedangkan Iqbal Wibisono (Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peme-

nangan Pemilu Wilayah 2 DPP Partai Golkar) mengatakan, keputusan final siapa calon bupati dan wakil bupati Sleman yang akan diusung oleh Partai Golkar adalah melalui rekomendasi dari DPP

Partai Golkar. Sebelum rekomendasi tersebut turun, Harda Kiswaya diharapkan terus melakukan

sosialisasi untuk menambal elektabilitasnya. "Namun demikian kalau diawal DPD Partai Golkar Sle-

man sudah merumuskan calon yang akan diusung, biasanya tidak jauh dari situ," ujarnya. (Dev)-f

### RAKOR KKS DAN MOU

## Integrasikan Data untuk Merespons Tantangan Kesehatan

**SLEMAN (KR)** - Undang Undang Kesehatan memerintahkan Komite Kebijakan Sektor Kesehatan untuk mengintegrasikan rencana, kebijakan dan melakukan monitoring, evaluasi kebijakan. "Ini Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Sektor Kesehatan/KKS untuk ketiga kalinya. Dalam momentum ini pula, dilakukan Penandatanganan Memorandum of Understanding/MoU atau Kesepakatan Bersama Komite Sektor Kesehatan tentang Integrasi Service Delivery dan Interoperabilitas Data Bidang Kesehatan," ujar Menteri Kesehatan Ir Budi Gunadi Sadikin SSI kepada wartawan. Hal ini dilakukan usai menyampaikan arahan sekaligus membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Komite Kebijakan Sektor



KR - Jayadi Kastari

**Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah), dr Hasto Wardoyo dan Prof Ali Gufron Mukti PhD (kiri) memberi keterangan pers.**

Kesehatan (KKS) di Sheraton Mustika Yogyakarta, Jalan Laksda Adisutjipto Km 8,7, Sleman, Sabtu (6/7). Saat memberi keterangan pers, Menkes didampingi dr Hasto Wardoyo SpOG(K) selaku Kepala BKKBN RI dan Prof Ali Gufron Mukti PhD selaku Direktur BPJS.

Disampaikan Budi Gunadi Sadikin, penandatanganan Kesepakatan Bersama Komite Kebijakan Sektor Kesehatan antara Kementerian Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (B-

POM), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN). "Integrasi, monitoring dan evaluasi kebijakan itu penting. Ini bentuk mencari format komunikasi saling berintegrasi, jadilah kesepakatan bersama kementerian dan lembaga," ucapnya.

Sedangkan Hasto Wardoyo mengatakan, untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional dan meningkatkan efektivitas koordinasi serta sinergi antar sektor, diadakan high Level Meeting Komite Koordinasi Sektor Kesehatan (HLM KKS). "Pertemuan strategis ini bertujuan untuk merespons dinamika dan tantangan kesehatan yang semakin kompleks di era global yang pesat," ujar Hasto Wardoyo. (Jay)-f



### Butuh Keberanian Bupati Ambil 'Policy' Untungkan Rakyat

**SLEMAN (KR)** - Pertumbuhan investasi di Kabupaten Sleman cukup pesat. Hal itu terlihat banyaknya hotel, restoran, pabrik, toko berjejer bermunculan di Kabupaten Sleman. Agar keberadaan investor ini dapat menguntungkan rakyat dan pemerintah daerah, dibutuhkan keberanian Bupati Sleman dalam mengambil 'policy'.

Anggota DPRD Sleman dari Fraksi PKS Agus Mas'udi ST mengatakan, setiap 'policy' yang diambil bupati harus berpikir untuk kepentingan daerah dan menguntungkan bagi rakyat. Dengan harapan, semakin banyak investor yang masuk di Kabupaten, semakin akan meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Keberanian bupati ambil kebijakan yang untungkan pemda dan rakyat sangat diperlukan. Agar keberadaan investor itu berdampak positif bagi pemda maupun rakyat, khususnya di bidang ekonomi," kata Agus Mas'udi atau yang kerap disapa Gus Ud, Minggu (7/7).

Kenapa itu penting dilakukan, lanjut Gus Ud, Sleman ini memiliki Daxu yang merupakan produk dari BUMD PDAM Tirta Sembada. Dimana bupati perlu membuat kebijakan setiap hotel

**Agus Mas'udi ST Anggota DPRD Kabupaten Sleman dari Fraksi PKS**



KR-Istimewa

dan toko berjejer menggunakan air mineral dari Daxu. "Bupati Sleman harus berani ambil kebijakan setiap hotel di Sleman menggunakan air mineral dari Daxu. Kemudian toko berjejer, berapa persennya harus menjual Daxu," pinta anggota Komisi B DPRD Sleman ini.

Dengan kebijakan tersebut, Daxu akan lebih dikenal masyarakat secara luas. Selain itu juga akan mendukung strategi pemasaran dari Daxu untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Sehingga nantinya dapat meningkatkan PAD di Sleman. "Jadi *cawacawe* Bupati untuk ikut memasarkan produk Daxu itu penting. Salah satunya mengharuskan hotel dan toko jaring menyediakan Daxu. Ketika Daxu ini banyak permintaan, harapannya PAD akan meningkat," ujar Gus Ud.

Di samping itu, bupati juga membuat kebijakan bagi setiap investor di Sleman harus menyerap tenaga kerja lokal. Dengan harapan dapat mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Sleman. "Bagaimana keberadaan investor itu juga mengurangi pengangguran. Caranya membuat kebijakan, berapa persen dari kebutuhan tenaga kerja itu merupakan tenaga lokal," tambah politisi dari Dapil 4 Sleman ini. (Sni)-f

### CERITA NASABAH YANG TERBANTU HADIRNYA LPS

## Dasuki: Sekali Lagi, Terima Kasih LPS

**JAKARTA (KR)** - Dasuki (45) dan Ny Sutinih (70) merasa lega dan plong setelah tabungannya yang selama ini tersimpan di Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Karya Remaja Indramayu (BPR KRI), dinyatakan layak bayar dan berhak mendapatkan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan. Proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi BPR KRI dilakukan setelah izin usaha bank tersebut dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 12 September 2023.

"Awalnya kami terhambat untuk mengambil uang kami, tapi sekarang sujud syukur kami, Alhamdulillah berkat LPS akhirnya mendapatkan hak kami kembali. Apalagi di saat kami sangat mengharapkan sekali, ibaratnya kami seperti mendapatkan durian runtuh," ujar Dasuki saat ditemui usai pembayaran tahap I di bank pembayar yang ditunjuk LPS, di Indramayu.

Dasuki mengungkapkan, jika tabungannya merupakan hasil dari penjualan tanah. Rencananya uang tersebut akan digunakan untuk membeli tanah untuk kemudian ia dapat garap kembali. Sisanya untuk modal usaha dan sebagian lagi untuk biaya berobat ibunya, Ny Sutinih yang sejak lama menderita sakit.

"Waktu itu karena terkendala, akhirnya pengobatan Ibu saya pun tertunda, kemudian biaya pendidikan untuk anak saya juga belum bisa dibayarkan. Namun sekarang keadaannya berubah, sekali lagi terima kasih LPS, terima kasih sekali," ujarnya.

Menurutnya asalkan segala persyaratannya terpenuhi, segala proses pencairan simpanannya berlangsung cepat, lancar dan juga mudah. Dasuki mengaku tidak jera untuk menabung di bank, menurutnya ada LPS yang akan menjamin simpanannya di seluruh bank yang beroperasi di seluruh Indonesia.



FOTO - KR ISTIMEWA

**Ketua Dewan Komisiner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa memantau langsung pembayaran klaim simpanan nasabah BPR di Indramayu**

Tiga persyaratan yang dikenal dengan 3T tersebut, yakni simpanan nasabah Tercatat dalam pembukuan bank, nasabah tidak memperoleh bunga simpanan yang melebihi Tingkat bunga penjaminan yang telah ditetapkan oleh LPS, dan nasabah tidak melakukan Tindakan yang merugikan bank, seperti memiliki kredit macet dengan terindikasi melakukan fraud atau tindak pidana perbankan.

Selain Dasuki, ada ratusan ribu nasabah lain yang telah terbantu dan merasakan manfaat dari hadirnya LPS.

Masyarakat tidak perlu khawatir lagi jika terdapat bank yang dicabut izin usahanya, sebab LPS akan membayarkan simpanan nasabah bank tersebut. Percepatan pembayaran klaim simpanan nasabah dari bank yang

dicabut izin usahanya adalah salah satu saja terobosan yang dilakukan oleh LPS pada periode tahun 2023 dan awal tahun 2024 ini. Beberapa proses pembayaran klaim simpanan nasabah BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya pada akhir tahun 2023 dan awal 2024 dapat dilakukan dengan cepat dimana pembayaran tahap pertamanya dapat dilakukan hanya dalam waktu 3 - 5 hari setelah dicabut izin usahanya.

#### Penyelamatan BIMJ

Bahkan LPS mencetak sejarah dalam penanganan bank bermasalah. Belum lama ini, tepatnya pada tanggal 29 Mei 2024, LPS berhasil sehatkan kembali Bank Perekonomian Rakyat Indramayu Jabar (BIMJ), menjadi bank normal yang sebelumnya masuk

dalam kategori Bank Dalam Resolusi (BDR). Hal tersebut juga merupakan langkah terobosan untuk penanganan bank yang lebih efektif, sehingga memungkinkan LPS melakukan tindakan penyelamatan oleh calon investor atau pihak lainnya, sebelum LPS memutuskan opsi resolusi apakah purchase and assumption, bridge bank, penyertaan modal sementara, atau likuidasi.

#### Pencapaian LPS Tahun 2023

LPS mempertahankan Opini Wajar dalam Semua Hal yang Material (WTP) sebanyak sepuluh kali berturut-turut. Karena Laporan Keuangan LPS sejak tahun 2014 hingga tahun 2023 selalu memperoleh opini Wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan

di Indonesia dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).

Kemudian, sampai dengan tahun 2023 LPS telah memiliki 4 (empat) sertifikasi ISO, yakni ISO 27001:2022 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi), ISO 30301:2019 (Sistem Pengelolaan Arsip), ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu), dan ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan). Selanjutnya, hasil survei penilaian integritas KPK, LPS meraih kategori "terjaga" dengan skor di atas rata-rata nasional selama 3 tahun berturut-turut berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lebih jauh, LPS juga mendapatkan penghargaan dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023, LPS meraih predikat sebagai lembaga yang "Informatif" dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik. LPS juga meraih penghargaan HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 (Indonesia Region). Penghargaan ini merupakan hasil atas komitmen LPS dalam mewujudkan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan talenta terbaik yang berdaya saing.

Dari sisi pengembangan organisasi, awal tahun 2024 ini LPS juga mengembangkan organisasi dengan membuka 3 kantor perwakilan, yaitu di Medan, Makassar, dan Surabaya. Pembukaan kantor perwakilan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan LPS dalam melakukan pemantauan dan deteksi dini bila terjadi potensi permasalahan kondisi bank di daerah tersebut, sekaligus mengefektifkan langkah LPS dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai program penjaminan simpanan nasabah di bank. (Roy)